

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

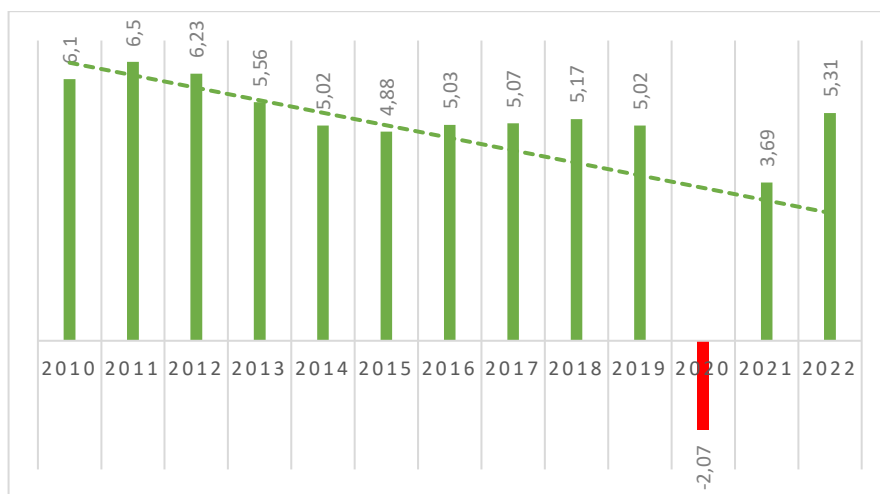
### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semenjak kelahiran ilmu makro ekonomi dua isu mendominasi yaitu mengenai laju pertumbuhan output dan konsumsi nasional. Hal tersebut adalah akibat dari adanya masalah perekonomian yang muncul terkait inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dengan berkembangnya waktu pertumbuhan output agregat menjadi tujuan dari setiap negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan tingkat produktivitas tinggi dalam suatu negara. Dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi memberikan potensi bagi negara-negara untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kehidupan yang layak, sumber daya yang memadai, dan pemerataan adalah fasilitas yang akan diperoleh jika berhasil secara ekonomi. Hal ini yang kemudian menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai hal penting dalam melihat kemajuan suatu negara. Meskipun secara empiris pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengalami peningkatan namun juga mengalami kondisi yang fluktuatif terutama saat terjadi suatu krisis (Mahendra, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sasaran penting dalam kebijakan suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dan standar hidup warganya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dituju dengan jalan panjang karena menjadi satu-satunya faktor untuk melihat keberhasilan dalam jangka panjang (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Indonesia yang masih masuk dalam kategori negara berkembang masih bergelut mengenai pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dinyatakan secara eksplisit bahwa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama negara melalui pembangunan nasional. Dengan berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami peningkatan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian global. Dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia dalam kelompok G20, yaitu kelompok negara dengan kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Hal tersebut cukup menunjukkan bahwa kekuatan posisi ekonomi Indonesia turut diperhitungkan dalam percaturan ekonomi global (Nugraha, 2013). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



**Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023), diolah.

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2022. Diperlihatkan pada tahun 2010 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,1% terhadap tahun sebelumnya dengan nilai PDB Rp 6.864.133,10 miliar. Dua tahun kemudian

kinerja ekonomi semakin memperlihatkan kenaikannya, namun setelahnya pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan walaupun masih berada diatas angka 5%. Sayangnya, angka tersebut tidak dapat dipertahankan karena munculnya pandemi *Covid-19* di dunia pada tahun 2019 akhir, dan mulai masuk ke Indonesia sejak 2020 awal. Akibatnya perekonomian dunia mengalami gunjangan, dan Indonesia yang turut terdampak mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sangat dalam hingga menyentuh angka -2,07% sepanjang tahun 2020. Beruntung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional akhirnya ekonomi Indonesia mampu pulih kembali dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif diangka 3,69% pada tahun 2021 dan kembali merangkak naik sampai tumbuh 5,31% pada tahun 2022. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat pasca pandemi *Covid-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki kekuatan untuk segera bangkit ketika mengalami kondisi buruk sekalipun masih dibatasi ruang gerak ekonominya dalam masa pemulihan pasca pandemi *Covid-19* (Kasna, 2021).

Jika berbicara mengenai perekonomian dan pertumbuhan ekonomi tentu tidak terlepas dari yang namanya uang, uang adalah alat penggerak ekonomi yang keberadaannya dapat menunjang berjalannya sistem ekonomi melalui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan uang dalam perekonomian merupakan perkembangan dari sistem barter masyarakat zaman dahulu. Uang menjadi jalan keluar atas kekurangan atau kelemahan penggunaan sistem barter (Hasan, 2014). Dalam perkembangannya, uang sebagai alat tukar telah mengalami perubahan dari masa ke masa hingga kini paling familiar di masyarakat adalah uang kertas dan logam atau disebut uang kartal. Uang inilah

yang hingga saat ini masih berlaku baik sebagai alat tukar ataupun alat bayar.

Sebagai alat pembayaran yang sah, uang memegang peranan penting dalam transaksi ekonomi untuk jual beli barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan masyarakat. Dalam sistem ekonomi suatu negara uang dicetak oleh otoritas moneter yaitu bank sentral, yang di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Selain digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*), uang juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *standard of value* (pengukur nilai), *store of value* (penyimpanan nilai), *unit of account* (satuan hitung), dan bahkan dalam ekonomi modern uang juga dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan (Mardiana, 2014). Dengan begitu kompleksnya, maka uang menjadi sangat strategis yang terus mengalir dan mengalami perputaran dalam perekonomian, atau yang disebut sebagai *flow concept*, yaitu uang selalu mengalami perputaran terus menerus yang berdampak pada keuntungan yang bisa diperoleh sehingga uang perlu diinvestasikan ke sektor riil (Soemitra, 2017).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah terjadi dengan sangat masif diberbagai aspek kehidupan. *Smartphone* dan internet menjadi kebutuhan yang wajib ada sebagai penunjang dalam dunia modern. Semuanya telah mengalami perkembangan sangat pesat, tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Inovasi keuangan dan perbankan telah menawarkan segala bentuk kemudahan untuk bertransaksi melalui sistem pembayaran yang canggih (Tarantang et al.,2019).

Dalam kemajuan sistem pembayaran tersebut, muncul instrumen pembayaran non tunai sebagai bentuk modernisasi alat transaksi. Sehingga kini telah dikenal alat transaksi berupa uang dalam bentuk tunai dan non tunai. Uang tunai (kertas dan logam) masih tetap berlaku dan digunakan sebagai alat

pembayaran disamping adanya alternatif pembayaran dengan non tunai berupa *card based instrument* dan *electronic based instrument* (Lintangsari *et al.*, 2018).

*Card based instrument* atau yang dikenal sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari kartu ATM/Debit dan kartu kredit. Sedangkan *electronic based instrument* adalah *e-money* atau uang elektronik baik yang berbasis *server* maupun *chip*. Keduanya merupakan bentuk inovasi keuangan dalam pembayaran non tunai yang memang belum sepenuhnya menggeser atau menggantikan keberadaan uang tunai sebagai alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia dengan alasan kebiasaan (Puspitasari *et al.*, 2021).

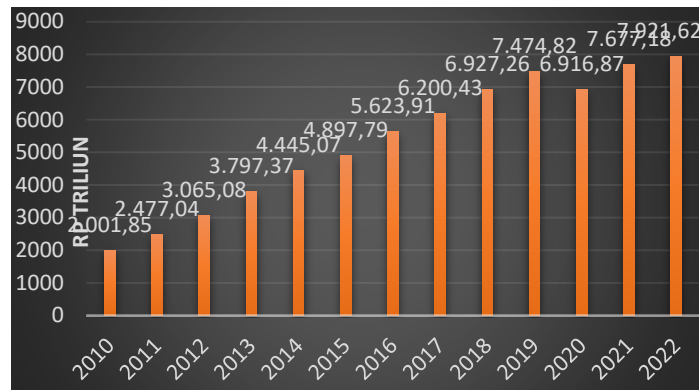
Di Indonesia aturan mengenai penggunaan alat pembayaran non tunai tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia. *E - money* atau uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Bank Indonesia telah mencanangkan sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam PBI No. 19/8/PBI/2017 pada 21 Juni 2017. Langkah tersebut merupakan perubahan cara transaksi yang dinilai lebih efisien dan praktis ditengah kemudahan yang dibawa oleh arus kemajuan teknologi (Munte, 2017).

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan guna kemudahan dalam melakukan transaksi bagi masyarakat Indonesia dengan cara elektronifikasi transaksi keuangan yang mengubah cara pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Tujuannya adalah menciptakan metode pembayaran yang aman, efisien, dan lancar dengan dorongan integrasi ekonomi serta keuangan digital yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2020). Dengan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang

semakin masif akan terwujud *cashless society* seperti yang diharapkan, dan masyarakat tidak perlu lagi membawa uang dalam bentuk tunai ketika akan melakukan transaksi. Senada dengan GNNT, GPN memberikan kemudahan masyarakat untuk transaksi menggunakan alat pembayaran non tunai tanpa harus mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki, sebab dengan kartu berlogo GPN dapat terintegrasi dengan seluruh mesin EDC di Indonesia. Sehingga dengan adanya sistem yang saling terkoneksi dan interoperabilitas, biaya transaksi lebih murah dan lebih efisien (Bank Indonesia, 2017).

Dalam sebuah studi menunjukkan telah terjadi peningkatan dalam penggunaan pembayaran non tunai di Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19. Studi tersebut dilakukan oleh UOB ASEAN *Consumer Sentiment Study* 2020 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dalam penggunaan layanan pembayaran non tunai yakni sebesar 74%, paling tinggi diantara negara lainnya di ASEAN (UOB, 2020). Artinya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk penggunaan pembayaran non tunai yang diharapkan terus tumbuh.

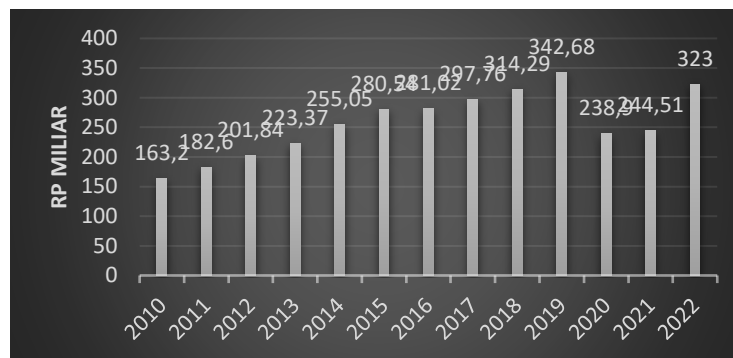
Hal tersebut juga dibuktikan telah terjadi peningkatan nilai transaksi dalam menggunakan instrument pembayaran non tunai baik kartu ATM/debit, kartu kredit, dan *e-money* dalam beberapa tahun terakhir. Berikut merupakan perkembangan jumlah nilai transaksi pembayaran non tunai selama tahun 2010-2022 di Indonesia :



**Gambar 1.2 Nilai Transaksi Kartu ATM/Debit Tahun 2010-2022**

Sumber : Bank Indonesia (2023), diolah.

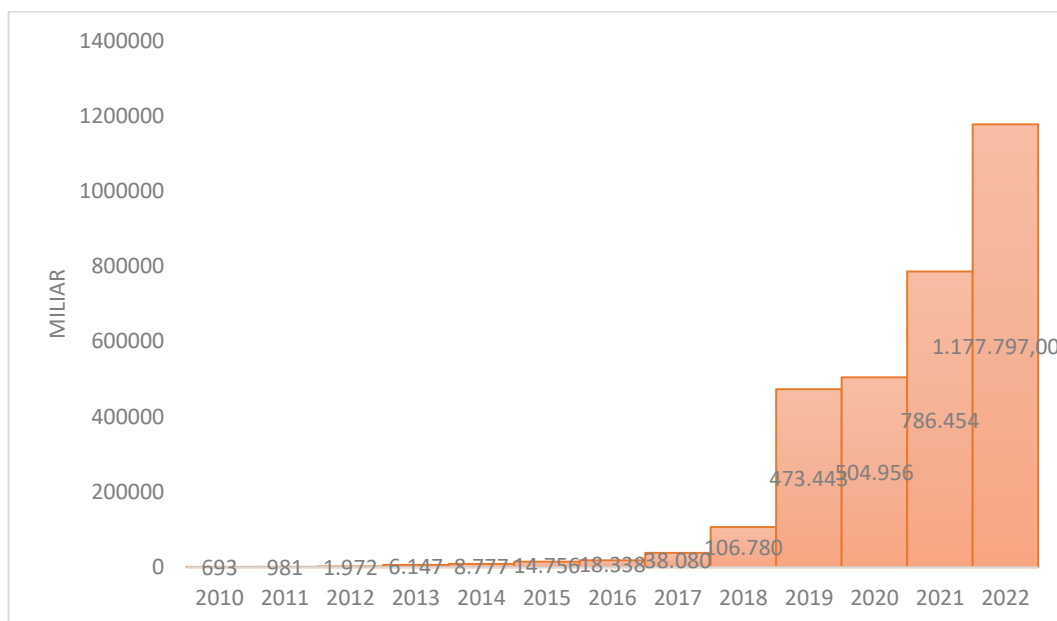
Gambar 1.2 diatas menunjukkan perkembangan nilai transaksi dari penggunaan alat pembayaran non tunai berupa Kartu ATM/Debit dari tahun 2010-2022. Terlihat nilai transaksi mengalami fluktuatif dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2010 nilai transaksi dari kartu ATM/Debit mencapai Rp 2.001,85 triliun. Angka tersebut kemudian terus mengalami kenaikan secara signifikan hingga pada tahun 2019, nilai transaksinya mencapai Rp 7.474,82 triliun. BI mencatat kenaikan tidak hanya terjadi pada nilai transaksinya saja melainkan juga dari sisi volume penggunaan. Namun ketika terjadi pandemi *Covid-19* yang masuk Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan terjadinya penurunan nilai transaksi kartu ATM/Debit yang mencatat sebesar Rp 6.916,87 triliun. Mengingat pada tahun tersebut pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat di luar, termasuk aktivitas perbankan atau penggunaan mesin ATM sehingga nilai transaksinya menurun. Tahun berikutnya ketika pembatasan kembali melonggar dan adanya kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah, penggunaan kartu ATM/Debit kembali meningkat hingga mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 7.921,62 triliun pada tahun 2022.



**Gambar 1.3 Nilai Transaksi Kartu Kredit Tahun 2010-2022**

Sumber : Bank Indonesia (2023), diolah.

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan penggunaan kartu kredit dari tahun 2010-2022 telah mengalami peningkatan dari jumlah nilai transaksi. Kartu kredit menjadi alternatif alat pembayaran non tunai berupa untuk melakukan transaksi. Tahun 2010 nilai transaksi mencapai Rp 163,20 triliun, kemudian terus mengalami peningkatan dan puncaknya pada tahun 2019 nilai transaksi kartu kredit menyentuh angka Rp 342,68 triliun. Sama halnya dengan penggunaan kartu ATM/Debit, nilai transaksi kartu kredit anjlok di tahun 2020 tercatat hanya Rp 238,90 triliun. Faktor yang sama yaitu pembatasan aktivitas akibat pandemi menjadi penyebab penurunan tersebut. Kemudian mampu pulih kembali dengan mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 245 triliun tahun 2021 dan terus melonjak hingga Rp 323,60 triliun pada tahun 2022.



**Gambar 1.4 Nilai Transaksi E-Money Tahun 2010-2022**

Sumber : Bank Indonesia (2023), diolah.

Gambar 1.4 memperlihatkan nilai transaksi *e-money* selama tahun 2010-2022. Dalam kurun waktu tersebut selalu terjadi kenaikan nilai transaksinya. Pada tahun 2010 nilai transaksi Rp 693 miliar, kemudian terjadi kenaikan sangat besar yakni ditahun 2019 yang mencapai Rp 473,4 triliun. Pada tahun 2020 saat terjadi pandemi *e-money* tetap eksis dengan mencatat nilai transaksi sebesar Rp 505 triliun, sebab penggunaan *e-money* lebih fleksibel dibanding APKM sebelumnya terutama dalam penggunaan secara online dari rumah. Nilai transaksi terus mengalami peningkatan, tahun 2021 bahkan sampai angka Rp 786,5 triliun dan pada tahun 2022 nilai transaksinya mencapai Rp 1.177,79 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-money* semakin digemari oleh masyarakat, tidak mengherankan karena hal tersebut dibarengi oleh majunya teknologi dan ketersediaan internet (Wijoyo *et al.*, 2020).

Peningkatan penggunaan instrumen non tunai baik berupa kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dalam

bidang sistem pembayaran. Pemerintah turut mendukung dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan dan bersama otoritas moneter mengarahkan penggunaan alat pembayaran non tunai tersebut secara lebih menyeluruh, karena dinilai memiliki dampak positif bagi perekonomian. Dengan adanya penggunaan alat pembayaran non tunai berpotensi akan menaikkan tingkat konsumsi pada masyarakat, dikarenakan semakin kecilnya kendala untuk melakukan transaksi terutama dengan tujuan belanja dengan semua yang serba praktis dan mudah. Sejalan dengan teori Keynes yang menyebutkan bahwa motif utama seseorang memegang uang adalah untuk tujuan transaksi (Mishkin, 2011).

Pergeseran dari penggunaan sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran non tunai mencerminkan perkembangan pada sistem perekonomian yang dapat berimplikasi pada peningkatan output agregat secara tidak langsung dan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Untoro *et al.*, 2014). Maka penting kemudahan dalam model transaksi untuk terus ditingkatkan, yaitu dengan instrumen pembayaran non tunai. Pembayaran non tunai seperti kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Marginingsih & Sari, 2019). Penelitian lain dari Nursari *et al.*, (2019) menghasilkan temuan bahwa dengan pembayaran non tunai dengan proksi kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* secara bersama-sama memberikan manfaat efisiensi dan peningkatan pada sektor riil dalam pembentukan PDB pada perekonomian Indonesia. Penelitian dari Diana & Kurniasari (2021) menghasilkan temuan transaksi atau penggunaan kartu kredit memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Pang *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa instrumen pembayaran digital yaitu kartu debit, kartu debit, dan uang elektronik memiliki korelasi positif dengan

pertumbuhan PDB di negara-negara CPMI (*Committee on Payments and Market Infrastructures*).

Namun ditengah terjadinya peningkatan nilai transaksi dari instrumen pembayaran non tunai baik kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* ternyata literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia belum maksimal. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10%. Meskipun meningkat dari hasil survei tahun 2019 namun masih terdapat gap antara literasi dan inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pemahaman dan penggunaan produk keuangan di Indonesia termasuk produk perbankan berupa alat pembayaran non tunai. Literasi dan inklusi keuangan dapat berperan dan menjadi solusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 (OJK, 2022).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, topik mengenai penggunaan sistem pembayaran non tunai sesuai digunakan untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut merupakan isu yang, sebab adanya peningkatan penggunaan alat pembayaran non tunai tidak sejalan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi, bahkan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Sehingga penulis mengangkat topik tentang **Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2022**. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan data pada tahun terbaru dan menggunakan variabel kontrol dalam pemeriksaan ketahanan (*robustness check*) untuk validitas hasil estimasi. Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur yang ada dalam mengungkap

dampak pembayaran non tunai terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah apakah kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia ?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan *e-money* terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya :

#### **1. Manfaat bagi penulis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan yang luas mengenai topik yang diteliti.

#### **2. Manfaat bagi pemerintah**

Hasil penelitian dapat memberikan sumber informasi untuk melakukan evaluasi-evaluasi sekaligus merencanakan kebijakan yang akan diambil bersama dengan otoritas moneter.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber referensi dan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.